

Bansos dan Hibah Rawan Penyelewengan

SEMARANG - Volume keuangan negara dalam penyelenggaraan keuangan negara, menimbulkan kecenderungan peningkatan risiko atas pengelolaan keuangan negara, khususnya hal pelaksanaan ban-

tuhan sosial dan hibah, belanja modal dan barang, menjelang tahun 2014.

Terkait bansos dan hibah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, selaku lembaga pemeriksa keuangan negara mengaku banyak menemukan adanya penyelewengan.

"Program dan penerima bahkan validasi, harus terukur, pengawasan dan pertanggungjawabannya harus jelas. Banyak penerima bansos dari LSM menerima sampai ratusan juta dengan mengatasnakan lembaga yang aneh-aneh," kata anggota BPK RI, Dr Agung Firman Sampurna usai acara Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK-APH-APIP di Hotel Crown Plaza, Kamis (28/11).

Soal lembaga penerima dana bansos dan hibah, Agung mengaku, sesuai aturan harus terdaftar di

Kemenkum dan HAM. Tapi nyatanya, mereka hanya terdaftar di Kesbang-polimas dan terkadang menerima bantuan per tahun.

Disinggung mengenai besarnya anggaran untuk kedua pos tersebut, Agung mengakui, hal itu mendorong kemungkinan kerawanan dan risiko dalam pengelolaan keuangan negara.

Hadir dalam acara tersebut dari Kejagung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Chaerul Amir. Kapolda Jateng, Irjen Pol Dwi Priyatno, Penasihat KPK, Suwarno. Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akutansi Negara, Gatot Darmasto.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, Polri berupaya melakukan penindakan hukum, karena menimbulkan kerugian negara. ■ rdi—sn



RAWAN KORUPSI: Para pemateri saat menyampaikan materi dalam Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK di Hotel Crown Plaza, Kamis (28/11). ■ Foto:Sunardi.